

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Aprizay, Yuda satrya, Darwanis, dan muhammad arfan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh*.
- Arpani, W. N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eksandy, Imam Hidayat, Nadia Iarasati, Arsy Abbas, D. Surya. (2020). Belanja Modal di Provinsi Banten beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi, 6*.
- Eky Ermal Muttaqin, Warsani Purnama Sari, P. R. dan D. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal, Vol. 1 No.*
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian* (Ed.1 Cet.2). Medan: USU Press.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan & strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional (hal. 117).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jan, H. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Volume 13 N, 1–10*.

kemenkeu. (2019). Ini “Catatan” Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal. <https://www.kemenkeu.go.id>. Diambil dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-catatan-menkeu-terhadap-pengelolaan-apbd-yang-kurang-optimal/>

Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21*(02), 424–431. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1509>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Revisi Tah)*. Yogyakarta: Andi.

Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Diambil 14 November 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>

Olivia, G. (2019). Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. Diambil dari <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-modal-tumbuh-lambat-lima-tahun-terakhir-pemerintah-diminta-tambah-pagu>

*Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021*. (n.d.).

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. (n.d.).

Periansya, Ardiyan, N., Susi, A., Fadilia, N., Gian, P., & Melani, D. S. (2020). Analisis Atas Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(33), 158–168.

Pratama, wibi P. (2021). 33 Provinsi Belanja di Bawah Pendapatan, Realisasi APBD Masih Minim. Diambil 10 November 2021, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210923/10/1446011/33-provinsi-belanja-di-bawah-pendapatan-realisasi-apbd-masih-minim>

Priatna, H., & Puwadinata, J. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.3 No.2.

Pudjut Harianto, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan STIE Balikpapan, 12(September), 2086–1117.

Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.

Sarundajang, S. H. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Septiyani, P. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal. *Jurnal ilmiah fakultas ekonomi universitas flores*, 11.

Subowo, & Wati, E. R. (2010). Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.2 No.2.

Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718.

Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sulistiyawati, A. I., & Purwanti, N. S. (2021). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores, Vol.11 No.*
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS.* (F. Sigit Suyantoro, Ed.). Yogyakarta.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, 6(1), 12–22.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.* (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Widjaja, H. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Rajawali P). Jakarta.
- Zahari, M. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 18(3), 635.* <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.531>